

FARABI

Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah
ISSN 1907 – 0993
E ISSN 2442 – 8264
Vol. 18 No. 2, Desember 2018

POLITIK KEAGAMAAN KOLONIAL : DISKONTINUITAS DAN KONTINUITAS DI INDONESIA

Oleh: Taufik Ajuba

ajubataufik@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penjajahan Belanda ke Indonesia pertama kalinya adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di dunia. Hal seperti ini bisa dilihat dari pembentukan VOC untuk mengorganisir perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Keterkaitan dengan gerakan keagamaan di Indonesia, bisa dilihat dari awal kedatangan C. Snouck Hurgroje di Indonesia. Menurut pengamatan C. Snouck Hurgroje, Indonesia menghasilkan beberapa pengumpulan data mengenai pranata-pranata Muhammadan di Hindia Timur yang akan diusahakannya akan bermanfaat bagi Pemerintah Pusat. Dengan semakin lama Belanda menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menghasilkan kebijakan politik etis yang tujuannya adalah untuk menghasilkan pegawai yang bisa mengabdikan kepada Hindia Belanda. Kolonialisme yang di gagas oleh pemerintah Jepang justru memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan Islam di Indonesia, dengan memberikan peranan sosial dan politik yang penting kepada para pemimpin Islam melalui lembaga yang disebutnya *Shummukd* (Seksi Urusan Keagamaan) yang didirikan di setiap karisidenan.

Kata Kunci: Kolonial, Politik Keagamaan, Belanda, Jepang, Indonesia

A. Pendahuluan

Kolonialisme dan imperialisme pada dasarnya merupakan suatu sistem pamarasan yang dilakukan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Sedangkan kolonialisme yang terjadi di Indonesia dan bertahan dalam waktu yang tergolong cukup lama, memiliki ciri-ciri antara lain: *pertama*, kekuasaan di bidang politik oleh penguasa. *Kedua*, penindasan dan pamarasan yang sempurna tidak dapat dilaksanakan jika kekuasaan politik tidak dipegang kuat. Ini dilakukan oleh Belanda dengan cara pengawasan secara ketat dan cermat, untuk menjaga kemungkinan agar suatu kesempatan tidak dapat dikuasai oleh suatu bangsa. *Ketiga*, penaklukan ekonomi. Sistem perekonomian dibentuk dalam suatu porsi tertentu, agar segala kepentingan

penduduk terjajah sepenuhnya tergantung pada perusahaan yang dipegang oleh penjajah. *Keempat*, pemisahan sosial. Hubungan antara penjajah dengan penduduk asli sangat jarang terjadi, karena penduduk asli dianggap tidak memiliki kepintaran apapun. Hal ini berakibat bahwa daerah-daerah terjadi pemisahan hubungan antara manusia.¹

Kata kolonialisme pada umumnya dipahami sebagai penguasa Barat atas Timur yang dimulai sejak petualang bangsa-bangsa Eropa dari abad ke lima belas hingga kedua puluh. Robert J.C. Young mencoba memberikan sebuah pemahaman baru atas pandangan umum tersebut. Menurutnya, apa yang disebut sebagai penguasa satu pihak atas pihak lain terjadi dimana-mana dan kapan saja. Dengan demikian bagi Young, wacana kolonialisme diperluas tidak hanya pada relasi Timu-Barat. Selain itu, wacana kolonialisme juga bersifat lintas waktu. Akan tetapi, bagaimana juga relasi kekuasaan Barat atas Timur beberapa abad yang lalu merupakan wacana kolonialisme yang paling inprisif dalam studi pascakolonial.²

Tulisan ini mencoba menjawab bagaimana politik Keagamaan Kolonial; diskontinuitas dan kontinuitas di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan dalam makalah ini, pembahasan dipusatkan pada tiga persoalan, yaitu; pertama, politik keagamaan di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda yang terdiri dari beberapa sub pembahasan. Pada sub pembahasan pertama, penulis akan menjelaskan politik kolonial VOC. Pada sub pembahasan kedua, penulis akan menjelaskan nasehat politik keagamaan C. Snouck Hurgronje kepada Pemerintah Hindia Belanda. Pada sub pembahasan ketiga, penulis akan menjelaskan Nasehat C. Snouck Hurgronje Kepada pemerintah Hindia Belanda untuk Penaklukan di Aceh. Pada sub pembahasan keempat, penulis akan menjelaskan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di bawah politik etis. Pada pembahasan kedua, penulis akan menjelaskan produk hukum kolonial di Indonesia. Pada pembahasan bagian ketiga, penulis akan menjelaskan kolonial di zaman penjajahan Jepang. Setelah penulis memaparkan secara keseluruhan politik

¹ Lihat Sri Pangesti Dewi Murni. "Pergerakan Nasional " *e-USU Repository* @2005 Universitas Sumatra Utara.

² Sunaryo, Rasisme dalam Hasrat koonialisme: Sebuah Studi Pasca Kolonial. Dalam Mudji Sutrisno. *Hermeutika pascakolonial*. (yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm.123

keagamaan di era Belanda dan Jepang, penulis akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari tipologi penjajahan Hindia Belanda dan Jepang.

B. PEMBAHASAN

1. Politik Keagamaan di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda

a. Politik Kolonisasi VOC

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda : *Verenigde Oostindische Compagnie* atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta, setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau men deportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperang

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda

mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816 . Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825 - 1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan lain-lain. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870-an yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Politik Etis (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagiorang-orang pribumi , dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jenderal J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung disepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.³

b. Nasehat Politik Keagamaan C. Snouck Hurgroje Kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Sejak tahun 1887 berbagai pihak antarlain Bataviaasch Genootschp van Kunsten en Wetenschappen (Perhimpunan Betawi Kesenian dan Ilmu Pengetahuan), berusaha medatangkan Snouck ke Hindia, mula-mula dasar sementara, untuk penelitian ilmiah terhadap agama Islam yang akan membuahkan hasil juga bagi pemerintah pusat. Snouck sendiri terlibat dengan aktif dengan prakarsa ini, lihatlah misalnya surat tanganya sendiri kepada menteri jajahan Hindia Belanda tertanggal Leiden, 2 Juli 1888 surat tersebut hingga sekarang belum diterbitkan.

Keyakinan yang diperlihatkan oleh Snouck ketika meneliti politik keagamaan di Indonesia, menghasilkan beberapa pengumpulan data mengenai pranata-pranata Muhammadan di Hindia Timur yang akan diusahakannya akan bermanfaat bagi

³ <http://wikipedia.com>

Pemerintah Pusat. Di lihat dari segi pandangan politik usaha tersebut, terutama berdasarkan arti luhur agama Islam bagi pemerintah atas jajahan-jajahan kita dan arti luhur tuntutan berupa pengetahuan yang mendalam yang timbul darinya, juga arti luhur sistem religius politik itu sendiri dan bentuk khas yang telah timbul dari sistem tersebut pada orang Islam di Hindia Timur.

Sepanjang telaah yang dilakukan oleh Snouck diarahkan pada tujuan praktis ini, maka makin jelas baginya bahwa pengetahuan masih terlalu banyak terdapat kekurangannya juga dalam hal-hal yang bersifat pokok. Yang dimaksudkan oleh Snouck sendiri yakni pokok-pokok ajaran *tarekat tasauf* yang tersebar luasnya dan daya pengaruhnya di antara orang-orang Muhammadan di Hindia Timur.⁴

c. Penaklukan di Aceh.

Pelaksanaan pengawasan atas kepala-kepala dan penduduk yang sudah takluk kepada kekuasaan kita, antara lain dengan pengawasan atas surat jalan kampung bagi orang Aceh dijumpai perjalanan patroli, penangkapan terhaap orang-orang tanpa surat jalan atau membawa senjata tanpa surat izin tertulis dari pemerintah. Jika orang itu melawan atau melarikan diri maka terhadap orang bersenjata seperti itu akan digunakan senjata pula. Pelacakan pengajaran, dan pelumpuhan terhadap kepala-kepala yang tidak takluk, para pengurus “jihad” dan kuasa-kuasa mereka kepala gerombolan-dan gerombolan lainnya. Terutama hendaknya pemerintah siap untuk menyuruh sergap kepala-kepala rombongan pada waktu malam. Untuk beberapa hal pemerintah melakukan penyusunan strategi dengan cermat sekali.⁵

Di daerah taklukan, untuk sementara, beberapa kepala secara terkecuali diizinkan bergerak di dalam daerah mereka dengan pengiring dalam jumlah yang terkecil yang ditentukan dengan menyandang senapan. Senapan-senapan itu dalam hal tersebut didaftarkan menurut yang semestinya dengan segera sesudah habis waktu pemberian izin tersebut dicabut.

⁴ E. Van Donzel, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS Jilid I, 1990), hlm. XXII

⁵ E. Van Donzel, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS Jilid II, 1990), hlm. 248

Pembakaran kampung, rumah ibadah atau tempat tinggal penduduk di larang. Dalam perjalanan militer pun di daerah yang sedang melawan, hanya tempat tinggal gerombolan dan gerombolannya yang terletak di luar kampung, serta bangsal-bangsal dan gedung-gedung yang terdapat di dalam kubu-kubu musuh boleh dibakar.⁶

d. Kebijakan Pemerintah Belanda di Bawah Politik Etis.

Di bawah pengaruh semangat Etis, sistem pendidikan dari periode Liberal direorganisasi dan disesuaikan untuk bisa memenuhi tuntutan yang baru. Terdapat dua pendekatan dalam proyek seperti ini. Snouc Hurongje dan direktur pendidikan politik etis yang pertama (1900-1905), yaitu J.H Abendanon, lebih menyukai pendidikan yang bersifat elitis dalam kerangka ambisi mereka untuk mentransformasikan priyayi tradisional menjadi sebuah elit yang baru yang terdidik secara Barat. Dalam pandangannya kedua memberikan pendidikan Barat kepada kelas penguasa pribumi merupakan suatu yang amat penting untuk melatih elit pribumi yang setia dan kooperatif, yang para anggotanya memiliki kesanggupan menangani pekerjaan pemerintahan sipil Belanda. Lebih dari itu menurut Yudi Latif, pilihan ini juga bisa memangkas biaya-biaya administratif, menghambat “fanatisme” Islam, dan pada akhirnya menciptakan contoh yang bisa memberi inspirasi bagi kalangan terbawa masyarakat Hindia Belanda.⁷

Bagi anak-anak priyayi dan keluarga kaya pemerintah begitu berusaha untuk memperluas akses mereka terhadap sistem sekolah Eropa yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pengajaran. Usaha-usaha seperti ini didorong oleh “kebijakan asosiasi” dan oleh perkembangannya tuntutan dari para priyayi dan keluarga-keluarga kaya semacam itu dan penguasa atas bahasa Belanda sebagai cara baru untuk mempertahankan atau mengangkat status sosial mereka. Menurut Yudi Latif, proses “pembalanda-an” seperti inilah yang memiliki daya tarik dan membuat para pelajar

⁶ *Ibid.*, hlm. 250.

⁷ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa : Geneologi Intlegensia Muslim Abad ke-20.* (Bandung: Mizan, 2005), hlm.94.

sekolah-sekolah bergaya Eropa. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, didirikanlah sekolah-sekolah para priyayi dan keluarga-keluarga kaya.⁸

Pada level sekolah dasar, perkembangannya paling penting ialah diubahnya Eraste Klasse School(Sekolah Pribumi Kelas Satu) yang telah ada yang menjadi apa yang disebut sekolah *Holands-Inladsche School* (HIS, Sekolah Belanda untuk Pribumi) pada tahun 1914. Bahasa pengantar pengajaran di HIS adalah bahasa-bahasa daerah atau Melayu pada kelas-kelas awal dan kemudian bahasa Belanda pada kelas-kelas yang lebih tinggi. Secara teori, sekolah ini diperuntukan bagi anak-anak dari kalangan bangsawan dan kaum *boemi poeta* terpendang atau kaya lainnya.⁹

Pada level sekolah menengah, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan pribumi akan adanya sekolah HBS, dengan mendirikan Meer Utgebreid Lager Onderwijs, (MULO) pada tahun 1914. Sekolah ini merupakan adaptasi lokal dari sekolah menengah pertama di negara Belanda yang lama studinya tiga tahun. Sepanjang periode ini beberapa sekolah kejuruan masih tetap sarana bagi anak-anak dari golongan yang lebih redahan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi.¹⁰

Generasi-generasi awal dari intelegensia Hindia Belanda mengalami sekularisasi yang intens akibat dari sifat sekularisasi yang intens sebagai akibat dari sifat sekular kebijakan pendidikan Liberal serta kebijakan “asosiasi” dari rezim politik etis. Sebagai hasil dari proses sekularisasi ini, kebanyakan individu dari intelegensia ini memulai memisahkan diri mereka dari dunia pemikiran agama. Bahkan, untuk anak-anak priyayi Muslim yang taat, terpengaruh dari proses sekularisasi yang terlambaga dalam pendidikan Barat ini sangat susah untuk dielakan.¹¹

Tiga poin utama dalam politik etis Belanda pada masa itu adalah irigasi, migrasi, dan edukasi. Dalam poin edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya barat untuk kalangan pribumi. Akan tetapi keberadaan sekolah-sekolah ini ternyata tidak menjadi sebuah saran pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 96 .

⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 101

disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para pribumi berhitung, membaca, dan menulis. Setelah lulus dari sekolah, akhirnya mereka dipekerjakan sebagai pegawai kelas rendah untuk kantor-kantor Belanda di Indonesia.

Pada abad XX, selain pendidikan bersifat tradisional, pendidikan yang bercorak modern juga banyak muncul di masyarakat. Pendidikan yang bercorak modern ini, dikembangkan oleh organisasi Islam reformasi, Muhammadiyah. Selain mengajar ilmu-ilmu agama, sekolah-sekolah Muhammadiyah juga mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti Aljabar, Bahasa Belanda, Ilmu Bumi, dan lain-lain.

Munculnya pendidikan di kalangan masyarakat Bumi Putra, baik yang bercorak tradisional maupun modern, bagi pemerintah Kolonial Belanda, merupakan penghalang sekaligus ancaman bagi dirinya. Karenanya pemerintah Hindia Belanda melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat, bahkan pada tingkat tertentu melakukan pembatasan terhadap pendidikan Islam. Sebagai tandingan atas pendidikan Islam yang telah berdiri (baik tradisional maupun modern) pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah umum untuk masyarakat bumi putr, sebagai raksi pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan-pendidikan Islam yang telah ada sebelumnya.¹²

e. Produk Hukum Kolonial Hindia Belanda di Indonesia

Sebelum tahun 1870 pengusaha-pengusaha tidak dapat mendirikan perusahaan pertanian yang besar serta tidak ada kesempatan untuk mengembangkan sayapnya di Indonesia yang pada waktu itu disebut *Nederland Indie* (Hindia Belanda). Mereka tidak dapat bisa mendapat tanah dengan hak “*eigendom*” dan hanya dapat menyewa tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar atau tanah kosong (*woeste gronden*). Itupun dengan waktu yang terbatas, yaitu tidak lebih dari 20 tahun saja. Lagi pula hak sewa menurut hukum Eropa adalah hak yang bersifat pribadi (*persoonlijk*), yaitu hak yang melekat pada orangnya, tidak terletak pada bendanya (tanah). Bagi kalangan pengusaha, hak sewa tersebut dipandang tidak kuat dan tidak dapat dijadikan

¹² M. Mukhsin Jamil, *Agama-agama Baru di Indonesia* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), hlm.57.

tanggungan (*hypotheek*) untuk mendapatkan pinjaman di bank. Oleh sebab itu, Agrarische Wet 1870 mengintroduksi hak *erfpacht* dengan jangka waktu maksimum 75 tahun dan masih dapat diperpanjang bila dibutuhkan. Hak *erfpacht* dipandang lebih memenuhi kebutuhan para pengusaha, karena hak tersebut terlekat pada bendanya (tanah), sehingga dapat dijadikan tanggungan dalam meminjam uang di Bank untuk menambah modal.

Kendatipun sudah ada jenis hak yang dapat mengakomodasi kepentingan para pengusaha, belum berarti pemerintah dengan mudah memberikan hak tersebut kepada pengusaha. Karena, hak pemerintah dibatasi oleh hak-hak rakyat yang diperoleh menurut kebiasaan setempat (hak adat). Oleh sebab itu, maka diproklamirkanlah pernyataan tanah negara (*Domeinverklaring*), melalui Agrarische Besluit tahun 1870 (staatblad 1870 no 118). Proklamasi tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak *eigendom* seseorang, adalah tanah milik negara (*Domein vanden staat*). Dengan demikian, maka semua tanah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa pribumi menurut kebiasaan setempat, tergolong tanah milik negara (tanah negara). Karena, tidak satupun jenis hak menurut hukum kebiasaan di Indonesia (hukum adat) dapat disamakan dengan hak *eigendom* dalam hukum Eropa.

Pernyataan tanah negara sebagaimana diatur dalam besluit tersebut hanya berlaku di Pulau Jawa Madura, khususnya didaerah-daerah yang diperintahkan langsung oleh Belanda (daerah Gubernemen), tetapi tidak berlaku didaerah-daerah yang tidak diperintah langsung oleh Belanda/berpemerintahan sendiri (*zelfbestuur/swapraja*). Menurut Schrieke, sampai menjelang kejatuhan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia ada sekitar 93 % pulau Jawa Madura dan sekitar 40 % wilayah diluar Pulau Jawa Madura, merupakan daerah Gubernemen. Jadi, pernyataan tanah negara sebagaimana diatur dalam besluit tersebut, tidak berlaku untuk sebagian besar daerah diluar Pulau Jawa Madura yang merupakan daerah *swapraja*. Di daerah-daerah tersebut, tetaplah berlaku hukum adatnya masing-masing yang tentu saja pluralistik. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintahan kolonial Belanda memperluas wilayah berlakunya *Domeinverklaring* melalui sejumlah pernyataan khusus, antara lain untuk

daerah-daerah gubernemen di Sumatra (staatblad 1874 no 94), Manado (staatblad 1877 no 55), serta Kalimantan Selatan dan Timur (staatblad 1888 no 58).¹³

2. Kolonial di zaman Penjajahan Jepang

Jepang menduduki dan menguasai Indonesia. Masa pendudukannya berlangsung sangat singkat, dari Februari 1942 hingga agustus 1945. Walaupun demikian, kekuasaan Jepang sangat singkat dan menimbulkan dampak yang mendalam termasuk dalam hal kebijakan agama. Sangat berbeda dengan politik keagamaan yang diterapkan oleh Belanda, politik keagamaan Jepang dalam banyak segi justru sangat berlawanan dengan kebijakan agama kolonial Belanda. Kalau pemerintah Belanda tidak memberikan leluasa yang begitu berarti bagi Islam, maka pemerintah Jepang justru memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan Islam di Indonesia, dengan memberikan peranan sosial dan politik yang penting kepada para pemimpin Islam melalui lembaga yang disebutnya *Shummukd* (Seksi Urusan Keagamaan) yang didirikan di setiap karisidenan.¹⁴

Jepang memang tidak memiliki kemahiran di bidang akademik dan perlengkapan Ilmiah seperti pendahulunya tetapi Jepang sangat menyadari bahwa Islam merupakan kekuatan sangat besar di Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya mengapa demikian? Setidaknya pada skala makro Jepang merangkul umat Islam sebagai misi dalam politik perang Asia-Rayanya. Jepang menginginkan adanya orientasi dan komitmen Islam Indonesia mengarah ke Matahari Terbit (jepang)¹⁵

Pada bulan-bulan pertama pendudukan Jepang melakukan beberapa aksi terhadap Islam Indonesia. *Pertama*, melarang organisasi-organisasi dan partai-partai Islam beroperasi; *kedua*, melarang pengajaran dan penggunaan tulisan bahasa Arab; *ketiga*, mengatur dan mengontrol pendidikan Islam dan permintaan izin untuk pertemuan-pertemuan termasuk pertemuan keagamaan. Namun dengan tindakan represi seperti itu, Jepang juga melansir beberapa kegiatan yang tujuannya adalah

¹³ Lihat Hedar Laudjeng, HUKUM KOLONIAL DI NEGARA MERDEKA. <http://www.huma.or.id>

¹⁴ M. Mukhsin Jamil, *Agama-agama Baru di Indonesia. Ibid.*, hlm. 62.

¹⁵ *Ibid.*,

“memobilisasi” Islam Indonesia terutama kegiatannya dengan dampak tindakan seperti itu pasca kemerdekaan. Tetapi dalam benak pikiran pemerintah militer Jepang aksi-aksi seperti ini tidak akan merusak rencana menarik simpati dari kalangan umat Islam.¹⁶

Sementara pembentukan seksi urusan keagamaan (*Shumukd*) yang dilaksanakan di setiap karesdenan pada dasarnya merupakan pengembangan atau lanjutan dari kebijakan pendirian *kantoor voor het Inlandsche Zaken* (kantor urusan pribumi) oleh pemerintah kolonial Belanda. Lembaga ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah dipegang oleh Jepang, tidak hanya dengan program pengembangannya hingga merambah kesetiap kerisdenan, tetapi juga perluasan bidang garapannya hingga menyebar ke Departemen Dalam Negeri, Kehakiman, Pendidikan dan Peribadatan Umum. Dari sinilah untuk pertama kalinya pribumi dan kalangan muslim mendapatkan kedudukan politik dalam pemerintah tinggi Pemerintah Militer Jepang.¹⁷

Manfaat yang begitu besar diperoleh umat Islam atas kedudukan Jepang adalah dengan diadakannya pelatihan “alim ulama” (*Kurasawa*) atau pembentukan Hizbullah (*Boland*). Melalui pelatihan alim ulama dan Hizbullah seperti ini, umat Islam terlibat dalam perang kemerdekaan dan kelak dengan pengalaman kemiliteran ini banyak para pemimpin yang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penting diingat disini, bahwa pada masa sebelumnya, tentara zaman Belanda, KNIL, banyak direkrut dari orang-orang Kristen Indonesia. Demikian juga kebijakan pemerintah Jepang dalam banyak hal, sangat berbeda dalam hal kedudukan umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Jepang pada dasarnya merupakan lanjutan dari yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.¹⁸

Ketika Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang mulai melakukan gerakan ofensif untuk menguasai wilayah Indonesia, mereka disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk setempat. Bahkan, beberapa tokoh pergerakan nasional yang tadinya

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 64

¹⁸ *Ibid.*, hlm.65.

bersikap nonkooperatif terhadap Pemerintah Hindia Belanda bersedia melakukan kerja sama dengan militer Jepang. Meskipun demikian, bagi beberapa tokoh pergerakan nasional, terutama yang telah memahami proses pertumbuhan pan-Asianisme di Jepang tahun 1930- an seperti Mohammad Hatta, kerja sama tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati.

Selain itu, propaganda yang dilakukan oleh Jepang ditujukan pula untuk menarik simpati dari kalangan umat Islam Indonesia. Sejak tahun 1920, Pemerintah Jepang mulai memperhatikan umat Islam Indonesia sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial. Di antara sekian banyak kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Jepang adalah membangun Masjid Kobe pada tahun 1935 dan menyelenggarakan Pameran Budaya Islam dari tanggal 5 –29 November 1939 yang dihadiri oleh utusan dari Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Pada tahun 1943, namanya berubah menjadi Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Melalui kebijakan ini diharapkan pendudukan militer Jepang di Indonesia akan diterima sebagai saudara tua yang seagama.

Propaganda terhadap umat Islam Indonesia dapat pula dilihat dari *Sabda TennoHeika* tentang pernyataan perang terhadap Amerika dan Inggris yang diawali dengan kalimat “Kami, TENNO dari Keradjaan Dai Nippon, jang dengan koernia Allah ta'Ala, ada toeroenan dari TENNO JANG PERTAMA, bahwa Kami telah mengoemoemkan perang kepada Amerika dan Inggris”.¹⁰⁴ Pernyataan dengan menggunakan kalimat *koernia Allah ta'Ala* merupakan indikasi kuat agar umat Islam Indonesia yakin terhadap kebijakan Islam yang dikembangkan oleh Jepang. Selain itu, untuk menarik simpati umat Islam, Pemerintah Pendudukan Jepang memuat pengumuman dalam surat kabar yang berisi tentang bujukan agar masyarakat memberikan sumbangan bagi fakir miskin.¹⁹

Tujuan dari propaganda yang dilakukan oleh militer Jepang semata-mata untuk memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dalam Perang Pasifik. Dengan perkataan

¹⁹ Lihat Miftahul Falah *PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA* sebagai bagian dari buku *Peta; Cikal Bakal TNI* yang diterbitkan tahun 2005 oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga penelitian Universitas Padjadjaran. hlm.81.

lain, simpati bangsa Indonesia terhadap militer Jepang akan sangat membantu mereka dalam melaksanakan rencana sesungguhnya, yakni melakukan mobilisasi rakyat dalam rangka Perang Pasifik. Mobilisasi itu sendiri dilakukan oleh pemerintah militer Jepang, baik dalam rangka mengumpulkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia.

Dalam rangka melakukan mobilisasi rakyat Indonesia, langkah pertama yang dilakukan oleh *Saiko Shikikan* adalah membentuk organisasi Gerakan Tiga A yang dijiwai oleh semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia pada 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Sjamsudin, seorang nasionalis kurang terkenal. Tujuannya adalah sebagai upaya menanamkan tekad penduduk agar berdiri sepenuhnya di belakang pemerintah militer Jepang. Untuk mencapai tujuannya itu, Gerakan Tiga A kemudian menerbitkan *Asia Raja*. Meskipun demikian, usia dari Gerakan Tiga A tidaklah begitu lama. Pemerintah Militer Jepang menganggap gerakan ini tidak efektif dalam upaya mengerahkan bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Jepang sehingga pada bulan Desember 1942 gerakan ini dibubarkan oleh *Saiko Shikikan*.

Seiring dengan pembubaran Gerakan Tiga A, Pemerintah Militer Jepang kemudian mendirikan berbagai organisasi yang dipimpin oleh orang-orang Indonesia. Organisasi- organisasi tersebut adalah Poesat Tenaga Rakyat (Poetera), *Jawa Hokokai*, Barisan Pelopor, dan Gerakan Hidup Baru. Tujuannya adalah untuk memusatkan segala potensi bangsa Indonesia dalam rangka membantu Jepang memenangkan Perang Pasifik. Pada tanggal 9 Maret 1943, Pemerintah Militer Jepang meresmikan berdirinya Poesat Tenaga Rakjat (Poetera) di bawah pimpinan “Empat Serangkai”, yakni Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Kewajiban Poetera adalah memimpin rakyat untuk bersama-sama menghapus pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda; mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya; memperkuat rasa persaudaraan Jepang-Indonesia; mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang; serta membina dan memusatkan potensi bangsa Indonesia untuk kepentingan

perang Jepang. Meskipun di bawah pengawasan yang sangat ketat, para pemimpin Poetera dapat memanfaatkan gerakan ini untuk mempersiapkan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaannya.

Dalam pandangan Angkatan Laut Jepang, alternatif yang paling tepat untuk menguasai Indonesia adalah menjadikan wilayah tersebut sebagai negara perlindungan Jepang. Militer Jepang terlebih dahulu harus menduduki Indonesia secara militer, kemudian menjalankan pemerintahan militer untuk mengamankan kedaulatan penuh Jepang atas wilayah tersebut. Apabila situasi telah memenuhi syarat, wilayah tersebut akan diberi status setengah merdeka sebagai “Negara Kebangsaan Hindia Timur”. Hubungannya dengan Pemerintah Jepang akan diikat melalui sebuah perjanjian yang menetapkan Jepang sebagai negara pelindung bagi negara baru tersebut. Meskipun demikian, sampai bulan Juli 1941, belum terdapat perjanjian antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang mengenai pembagian daerah kekuasaan mereka di Indonesia jika militer Jepang berhasil menduduki Indonesia.

Sebelum tahun 1930-an, sebagian kelompok elite intelektual bangsa Indonesia menyadari bahwa ekspansionisme Jepang di Pasifik Barat akan berbenturan dengan negara imperialis Inggris dan Amerika Serikat. Dalam kaitan ini, masa depan Indonesia diperkirakan akan mendapat pengaruh dari persaingan negara-negara adikuasa tersebut. Soekarno merupakan salah seorang tokoh pergerakan Indonesia yang dengan tajam mengkritik kebijakan ekspansionisme Jepang ke wilayah Selatan. Bukan saja kebijakan tersebut bertentangan dengan slogan-slogan yang dilontarkan oleh Jepang, melainkan juga bertentangan dengan keinginan negara-negara Asia untuk mencapai kemerdekaannya.

Para pemimpin Poetera berusaha menanamkan nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Mereka mempropagandakan agar rakyat berjuang sampai kemenangan terakhir tercapai. Jepang menafsirkan kemenangan akhira dalam hancurnya Sekutu,

sedangkan Tiga Serangkai menafsirkan kemenangan akhir itu adalah terusnya penjajah, termasuk Jepang, dari Indonesia.²⁰

Dalam pandangan Sjahrir, Jepang tidak lain adalah sebuah negara totaliter Asia Timur yang paling menonjol sifat ultranasionalismenya. Sebagai seorang yang mengagungkan demokrasi, dirinya sangat membenci totaliterisme yang dikembangkan oleh Jepang karena akan menghancurkan demokrasi. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau Sjahrir memandang Jepang bukan objek kehormatan intelektual, terlebih lagi kebijakan ekspansi ke Selatan merupakan ancaman nyata terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sikapnya tersebut ia pertahankan secara konsisten ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942. Dirinya, bersama-sama dengan dr. Tjipto Mangunkusumo mengembangkan sikap nonkooperasi terhadap Jepang. Sikap keduanya kemudian didukung penuh oleh Gerindo yang menjadi organisasi pergerakan paling anti-Jepang.

Pengerahan kaum muda dan kaum pelajar dalam barisan semimiliter itu sepenuhnya mendukung Jepang yang mengalami kekurangan *man-power* sejak melakukan gerakan ofensif militernya. Sejak awal pendudukan, Pemerintah Militer Jepang telah mulai memikirkan usaha untuk memberikan latihan-latihan militer kepada penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan guna mempertahankan negerinegeri yang telah mereka kuasai. Kebijakan Pemerintah Militer Tentara Ke-16 di Pulau Jawa ternyata tidak diikuti oleh Pemerintahan Militer Tentara Ke-25 dan *Minseifu*. Tentara Ke-25 yang menjalankan pemerintahan militer di Sumatra menganggap bahwa di wilayah kekuasaannya tidak ditemukan sifat homogenitas penduduknya.²¹

Oleh karena itu, panglima tertinggi di Sumatra hanya mengizinkan penduduk setempat untuk mendirikan organisasi-organisasi lokal. Baru pada bulan Maret 1945, Pemerintah Militer Tentara Ke-25 memberikan konsesi politik kepada Sumatra dengan diizinkan membentuk *Chuo Sangi-in*. Demikian juga yang terjadi di wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*). *Minseifu* secara sengaja menutup-nutupi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

²¹ *Ibid.*, hlm.30.

berbagai peristiwa yang dianggapnya bertentangan dengan kebijakan pemerintah militer. Meskipun demikian, didaerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang didirikan gerakan Sumber Darah Rakyat (Sudara) yang berpusat di Makasar (Sulawesi Selatan) yang dipimpin oleh Andi Mappanyukki. Berbeda dengan Poetera, gerakan Sudara ini tidak begitu berkembang mengingat sifat pemerintahan yang diterapkan oleh Angkatan Laut Jepang yang keras terhadap kaum pergerakan nasional.²²

Seiring dengan mulai terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik, *Saiko Shikikan* kemudian membentuk berbagai organisasi semimiliter dan organisasi militer. Pembentukan organisasi semimiliter dilaksanakan pada tanggal 29 April 1943, yakni *Seinendan* dan *Keibodan*. Para pemuda yang berusia antara 15-25 tahun (kemudian diubah menjadi 14-22 tahun) berhak masuk menjadi anggota *Seinendan*. *Seinendan* didirikan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Maksud yang disembunyikan adalah sebagai upaya Pemerintah Militer Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkut usaha memenangkan Perang Pasifik.²³

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, penulis bisa mengambil beberapa kesimpulan antara Penjajahan yang di terapkan oleh Koloniah Hindia Belanda dan Jepang. Pertama, sistem penjajahan yang di lakukan oleh Kolonial pada hakikatnya tidak sama sekali menguntungkan rakyat Indonesia. Kedua, politik Etis yang diterapkan oleh Belanda sekedar menguntungkan kelas tertentu saja dan rakyat Indonesia tidak di perlakukan secara adil. Keempat, dibalik kepentinga penelitian politik keagaman yang di lakukan oleh C. Snouck Hurgroje terutama di Aceh semata-mata tidak mempunyai dampak positif. Kelima, produk hukm yang diterapkan oleh Belanda sekedar menjaga kepentingan politik semata dan tidak mempunyai niat yang baik kepada rakyat Indonesia.

²² *Ibid.*, hlm.50.

²³ *Ibid.*, hlm 85.

Sedangkan politik keagamaan yang di terapkan Pemerintah Jepang ke Indonesia terdiri dari beberapa strategi; *pertama*, pemerintahan Jepang sangat mengistimewakan umat Islam dengan dibentuknya *Shummukd* (Seksi Urusan Keagamaan) di beberapa karisidenan. *Kedua*, pemerintahan Jepang melakukan pelatihan “alim ulama” (*Kurasawa*) atau pembentukan Hizbullah (*Boland*). *Ketiga*, propaganda militer yang dibuat oleh Pemerintahan Jepang semata-mata untuk memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dalam Perang Pasifik. Akhirnya, metode penjajahan yang dilakukan kedua negara antara Belanda dan Jepang, memiliki persamaan yang sangat mendasar yakni sama-sama “mengeksplotasi” rakyat Indonesia untuk kepentingan politik.

Kemunculan gerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang di gagas oleh Poesat Tenaga Rakjat (Poetera) di bawah pimpinan “Empat Serangkai”, yakni Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur, memberikan spirit kepada rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Upaya ke arah itu dilakukan dengan jalan memberikan latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan. Dalam rangka Perang Pasifik, *Seinendan* akan ditempatkan sebagai barisan cadangan yang akan mempertahankan garis belakang dari medan pertempuran.

DAFTAR PUSTAKA

Donzel, E. Van *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. terj. Sukarsi. Jakarta: INIS Jilid I, 1990

_____, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS Jilid II, 1990), hlm. 248

Dewi Murni. Sri Pangesti “Pergerakan Nasional “ *e-USU Repository @2005* Universitas Sumatra Utara.

Falah Miftahul, *PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA* sebagai bagian dari buku *Peta; Cikal Bakal TNI* yang diterbitkan tahun 2005 oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga penelitian Universitas Padjadjaran

Latif Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa : Geneologi Intlegensia Muslim Abad ke-20*. Bandung: Mizan, 2005.

Mukhsin, Jamil, *Agama-agama Baru di Indonesia* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008.

Sunaryo, *Rasisme dalam Hasrat koonialisme: Sebuah Studi Pasca Kolonial*. Dalam Mudji Sutrisno. *Hermeutika pascakolonial*. yogyakarta: Kanisius, 2004.

Laudjeng, Hedar **HUKUM KOLONIAL DI NEGARA MERDEKA**.
<http://www.huma.or.id>

<http://wikipedia.com>